

ABSTRAK

Orang tua atau wali harus berperan aktif dalam melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual, kasus pemerkosaan anak oleh orang tua pembedaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (3) berbunyi jika pelaku merupakan orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga maka ditambah ancaman 1/3 (sepertiga). Dalam Putusan hakim seharusnya mewujudkan keadilan tidak memihak bagi salah satu para pihak, justru harus sama rata karena adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati yang tidak memberikan sanksi maksimal dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan empiris, kasus dan konseptual, adapun penelitian ini dilaksanakan di pengadilan negeri pati, metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan, setelah itu keseluruhan bahan hukum di analisis dengan metode deksriptif – kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor 223/pid.sus/2020/Pn.pti tidak mewujudkan tujuan aspek kepastian, aspek keadilan, aspek kemanfaatan, hakim tidak memberikan sanksi maksimal dikarenakan setiap penjatuhan hukuman bersifat kasuistik yang dimana faktor utama dalam perkara ini yaitu adanya korban yang sudah hamil, jika dijatuhkan dengan sanksi maksimal maka figur ayah kandung dari anak korban dan terdakwa tersebut akan berkurang.

Kata Kunci: Pembedaan, Pemerkosaan Oleh Orang Tua, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Parents or guardians must play an active role in protecting children from violence and sexual abuse. In cases of child rape by parents, the punishment is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. Article 81 paragraph (3) reads as perpetrators who are parents, guardians, or people who have family relations, and then an additional threat of 1/3 (one third), The judge's decision should realize impartial justice for one of the parties; in fact, it must be equal because there are equal rights and obligations for both parties, aims to examine the consideration of the Pati District Court judge who did not give the maximum sanction in Decision Number 223/Pid.Sus/2020/PN Pati. This research belongs to the type of empirical legal research with an empirical, case, and conceptual approach. While this research was carried out at the Pati District Court, the data collection method was in the form of interviews and literature studies, after which all legal material was analyzed using a descriptive-qualitative method. The results of the study show that the judges at the Pati District Court in Decision Number 223/PID.sus/2020/Pn.pti did not realize the objectives of the aspects of certainty, justice, and expediency. The judge did not give maximum sanctions because each sentence is casuistic in nature, which is the main factor in In this case, there is a victim who is pregnant. If the child of the victim and the defendant is imposed with the maximum sanction, the figure of the biological father of the child of the victim and the defendant will be reduced.

Keywords: Criminalization, Parental Rape, And Child Protection

MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

Keadilan Harus Ditegakan Meski Langit Runtuh

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus; 42 SM

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dengan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak Zainul Arief dan ibu Fatecha, dan kakak saya Nurul Azmil Puspita dan (Alm) Muhammad Basofi Baihaqi serta orang-orang yang saya sayangi”

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.5 Keaslian penelitian.....	8
1.6 Metode penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, PEMIDANAAN, TERHADAP PIDANA PERKOSAAN	16

2.1 Konsep dan Teori Pidana Pemidanaan	16
2.1.1 Jenis-Jenis Pidana	17
2.1.2 Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan.....	20
2.1.3 Teori Pemidanaan	24
2.1.4 Teori Keadilan.....	26
2.2 Prinsip dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak	27
2.2.1 Batasan Perlindungan Anak	27
2.2.2 Ruang Lingkup dan Prinsip Perlindungan Anak.	29
2.3 Tindak Pidana Perkosaan Anak Oleh Orang Tua	33
2.3.1 Batasan dan Unsur Tindak Pidana.....	33
2.4 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dan Kekerasan Seksual Anak.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA	41
3.1 Pengaturan Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Orang Tua.	41
3.1.1 Hak–Hak Anak Atas Perlindungan Dari Segala Bentuk Kekerasan.	41
3.1.2 Beberapa Aturan Yang Relawan	47
3.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati Atas Pemidanaan Terhadap Perkosaan Anak Oleh Orang Tua.	51
3.2.1 Gambaran Perkara Dan Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Putusan 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti.....	51
3.2.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati Dalam Penjatuhan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan.	56
3.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Serta Kemanfaatan	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
BIODATA PENULIS.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 Foto Waktu Penelitian

Lampiran 3 Putusan 223/Pid.Sus/2020/Pn.Pti